Kebijakan Pemerintah pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN)

Achmat Taufiq[1], Rahmadani Tri Susanto[2], Rizki Bangkit Prayugo[3], Gita Fitri Ramadhani[4]
[1]UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
[2,3]UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
[4]UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: ahmadtaufiqnajib@gmail.com, rahmadanitrisusanto@gmail.com, rizkibangkitprayugo@gmail.com, gitaf946@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2024-07-22
Revised: 2024-08-19
Published: 2024-09-01

Keywords:
Policy;
Change;
Goverment.

Abstract
This research discusses the government's policy on Minimum Competency Assessment (MCA) as a change from the National Examination (UN) in Indonesia. The background is the practice of unobjective scoring by teachers and schools in the previous EBTA and EBTANAS systems, which then triggered the birth of the UN policy with one strict standard. However, the focus on improving UN scores encouraged widespread cheating practices. The government then tried to overcome cheating practices by implementing UNBK (Computer-Based UN). As a form of change, the government then issued an AKM policy that aims to measure the basic and minimum competencies of students, not just measuring memorization skills. This research explains the definition, objectives, implementation process, instrument components, and reporting of the results of the IAQ.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2024-07-22
Direvisi: 2024-08-19
Dipublikasi: 2024-09-01

Kata kunci:
Kebijakan;
Perubahan;
Pemerintahan.

Abstrak
Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah terkait Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai bentuk perubahan dari Ujian Nasional (UN) di Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya praktik pemberian nilai yang tidak objektif oleh guru dan sekolah dalam sistem EBTA dan EBTANAS sebelumnya, yang kemudian memicu lahirnya kebijakan UN dengan satu standar yang ketat. Namun, fokus pada peningkatan nilai UN justru mendorong praktik kecurangan secara luas. Pemerintah kemudian berupaya mengatasi praktik kecurangan dengan menerapkan UNBK (UN Berbasis Komputer). Sebagai bentuk perubahan, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan AKM yang bertujuan untuk mengukur kompetensi dasar dan minimum peserta didik, bukan hanya mengukur kemampuan menghafal. Penelitian ini menjelaskan pengertian, tujuan, proses pelaksanaan, komponen instrumen, serta pelaporan hasil AKM.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajaran proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar merupakan mata rantai yang tidak terputus. Asesmen merupakan bagian dari evaluasi. Setiap asesmen yang diseleng-garakan harus memiliki makna dalam perbaikan proses pembelajaran dan sebaliknya ragam aktivitas pembelajaran menuntut penerapan beragam jenis asesmen.

Sejak tahun 1950, sistem ujian nasional telah diterapkan di Indonesia dengan beragam pergantian format serta nama. Dimulai dari ujian penghabisan serta ujian negara yang sangat sentralistis, kemudian masa vakum saat pemerintah hanya memberikan panduan umum ujian satuan pendidikan, digantikan oleh sistem yang memadukan nilai ujian oleh pemerintah (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau EBTANAS) dan nilai ujian satuan Pendidikan (Evaluasi Belajar Tahap Akhir atau EBTA). Periode EBTA dan EBTANAS tersebut memberikan sinyalemen kuat adanya praktik pemberian nilai yang tidak objektif oleh guru dan sekolah. Hal ini terlihat dari nilai EBTA yang seringkali nyaris sempurna, namun nilai EBTANAS yang rendah pada siswa yang sama.

Praktik "obral nilai" di sekolah tersebut kemudian memicu lahirnya kebijakan baru: UAN yang didasarkan pada satu standar yang ketat, dengan ancaman ketidaklulusan. Hal ini membuahkan terapi kejut. Pada 2003, ratusan ribu siswa tidak lulus meskipun dengan batas minimal ditetapkan sangat rendah yaitu 3,01 (dalam skala 0-10). Kebijakan satu standar dan

sanksi ketidaklulusan berlanjut pada periode UN, dengan batas minimal kelulusan yang ditingkatkan secara bertahap. Kebijakan ini membuat peningkatan hasil UAN/UN menjadi fokus utama bagi stakeholder pendidikan. Sayangnya fokus tersebut tidak selalu diterjemahkan menjadi upaya meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Ada indikasi bahwa tekanan untuk meningkatkan nilai UAN/UN justru mendorong praktik kecurangan secara luas. Pemerintah berupaya mengatasi praktik kecurangan dengan membuat sistem ujian berbasis komputer yang lebih efisien dan menjamin keamanan bahan tes. UN Berbasis Komputer (UNBK) mulai diterapkan hanya di 400-an satuan pendidikan pada 2015 (2%), dan secara cepat meningkat menjadi menjadi lebih dari 89.000 sekolah pada 2019 (93%). Dengan penurunan praktik kecurangan, tingkat kepercayaan terhadap data pun semakin tinggi. Nilai UNBK dapat dianggap lebih merefleksikan penguasaan siswa akan konten kurikulum. Namun tetap tersisa pertanyaan besar: seberapa relevankah kompetensi yang tercermin pada nilai UN dengan tantangan-tantangan Abad 21? Dan seberapa berhasilkah sistem asesmen nasional yang ada saat ini mendorong perubahan positif dalam praktik belajarmengajar dan mutu hasil belajar siswa?

Pemerintah sejak tahun 2003 telah menyelenggarakan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang kemudian bertransformasi menjadi Ujian Nasional (UN). UN sebagai alat evaluasi pemerintah terhadap hasil belajar siswa selalu diwarnai pro dan kontra. UN muncul sebagai respon atas kekhawatiran bias mutu hasil belajar antar-satuan pendidikan. Niat baik penyelenggaraan UN sebagai ukuran terstandar untuk mendorong semua pihak berpacu meningkatkan mutu ternyata memiliki sisi negatif. Nilai UN cenderung diposisikan sebagai tujuan utama. Kreativitas dan inovasi penilaian di dalam kelas seringkali terberangus dan mengerucut pada pola penilaian UN. Pembahasan mengenai peran UN terhadap perbaikan pembelajaran dan perubahan kultur belajar seringkali mendapat perhatian yang kecil. Nilai menjadi tujuan, diagnosa dan umpan balik asesmen terlupakan. Sejatinya asesmen merupakan cermin, alat merefleksi diri. Pemerintah berupaya memberikan cermin yang reliabel dengan migrasi sistem ujian berbasis komputer secara masif dan menyediakan analisis hasil UN secara detail. Namun pemanfaatannya sebagai dasar perbaikan pembelajaran belum optimal. Melakukan asesmen berulangkali tidak akan pernah menghantarkan kepada peningkatan mutu, selama hasilnya tidak dijadikan dasar perbaikan. Begitu pula dengan isu relevansi UN sebagai alat ukur yang diharapkan mampu mengembangkan potensi unik setiap peserta didik. Meskipun soal-soal kemampuan bernalar mulai menjadi bagian dari UN, tuntutan pengolahan cepat hasil UN berimplikasi kepada keterbatasan format soal yang digunakan. Hal-hal tersebut menghadirkan pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana UN mampu mewujudkan Pendidikan yang diamanahkan UU.

Reformasi sistem asesmen ini berangkat dari amanah undang-undang mengenai fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan (UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas). Pada tataran sosial, pendidikan berfungsi mengembangkan watak dan peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 3 UU). Pada tataran individual, pasal yang sama memandatkan pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik sebagai individu secara utuh, yang mencakup dimensi spiritual (beriman dan bertakwa kepada Tuhan), kognitif (berilmu pengetahuan), afektif-emosional (kreatif dan mandiri), serta sosial (warga negara yang bertanggung jawab). Selanjutnya, UU Sisdiknas menegaskan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." (Pasal 4). Asesmen Nasional merupakan proses evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk memetakan.

Mutu satuan pendidikan. Pemetaan dilakukan di semua sekolah/madrasah termasuk program pendidikan kesetaraan dan dirancang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Landasan pelaksanaan Asesmen Nasional adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 57 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 yang menegaskan bahwa Asesmen Nasional adalah bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Operasionalisasi UU Sisdiknas dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Dalam Permendikbudristek tersebut dijelaskan bahwa Asesmen Nasional dilaksanakan melalui. 3 (tiga) instrumen, yaitu Asesmen

Kompetensi Minimum (AKM) Literasi dan Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Asesmen Nasional diharapkan dapat menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

Asesmen nasional dilakukan bertujuan untuk mengubah paradigma evaluasi pendidikan di Indonesia sebagai upaya mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil bukan mengevaluasi capaian peserta didik yang sebelumnya digunakan dalam Ujian Nasional. Asesmen nasional akan dilakukan pada jenjang pertengahan sekolah yaitu kelas 5 untuk tingkat SD/MI, kelas 8 untuk tingkat SMP/MTs, dan kelas 11 untuk tingkat SMA/MA/SMK sehingga mendorong guru dan kepala sekolah memperbaiki mutu pembelajaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pelaku pendidikan untuk memperbaiki pembelajaran di tahun berikutnya.(Wirdayanti 2024)

Berbagai studi menegaskan bahwa era modern membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman konsep. Kecakapan dalam menerapkan pengetahuan konseptual, kecakapan berpikir tingkat tinggi, dan kecakapan dalam berkomunikasi merupakan aspek kunci dalam menghadapi kebutuhan modern yang semakin kompleks. Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui Programme for International Student Assessment (PISA). Sebagai suatu program asesmen skala besar, PISA tidak bertujuan untuk mengukur penguasaan siswa akan materi kurikulum sekolah melainkan lebih fokus pada menilai kecakapan individu dalam menerapkan kecakapan di berbagai situasi dunia nyata (Grek, 2009; OECD, 1999). PISA dilandasi pandangan pragmatis tentang pendidikan, yaitu mempersiapkan individu untuk belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, PISA memberikan perhatian tinggi pada situasi masalah dunia nyata dan kapasitas individu siswa untuk memasuki dunia kerja dengan kecakapan inti (core skills) yang mencakup literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi tersebut selanjutnya menjadi aspek yang diukur pada PISA yang selanjutnya dikenal dengan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains (Asesmen n.d.:1–2)

Perhatian tinggi masyarakat global terhadap literasi dan numerasi (literasi matematika) sebagai kecakapan inti (core skills) yang perlu dikuasai individu direspon pemerintah Indonesia dengan program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). AKM menanggapi kebutuhan global saat ini bahwa peserta didik diharapkan mampu beradaptasi dengan dunia yang cepat berubah dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dua kemampuan yang menentukan kecakapan seseorang untuk belajar sepanjang hayat adalah kompetensi literasi membaca atau literasi matematika, yang sering disebut numerasi. Dua kompetensi ini penting karena peserta didik perlu mengembangkan keterampilan logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan untuk memahami, memilah, dan menggunakan informasi secara kritis. Melalui AKM, peserta didik berlatih meningkatkan kecakapan literasi dan numerasinya dengan menyelesaikan masalah-masalah dengan beragam konteks. Dua kecakapan ini terus dikembangkan peserta didik sepanjang hayat melalui interaksinya dengan lingkungan dan komunitas masyarakat yang lebih luas.) (Hasanah and Hakim 2021)

Wacana pelaksanaan asesmen kompetensi ini membuat guru harus lebih kreatif dalam menentukan bahan penilaian. Hal ini akan mempengaruhi kebiasaan guru yang mengacu pada silabus tanpa adanya improvisasi model pembelajaran yang konvensional.(Driessen 2021) Sedangkan gagasan memberlakukan konsep literasi dan numerasi yang di susun secara mandiri oleh guru merupakan model penilaian yang bersifat progresif (Winata, Widiyanti, and Cacik 2021). Asesmen Nasional merupakan evaluasi pendidikan yang sangat baru di indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu Asesmen Kompetensi minimum (AKM), survey karakter dan lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif meliputi literasi membaca dan literasi numerasi. Sementara survey karakter digunakan untuk mengukur hasil belajar emosional dalam profil pelajar pancasila agar pelajar indonesia memiliki kompetensi global dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Jika asesmen dan kompetensi minumum dilakukan peserta didik, survey lingkungan belajar dilakukan pada semua pelaku pendidikan meliputikepala sekolah, guru, dan pesetas didik. Survey lingkungan belajar dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan sekolah yang sesungguhnya (Novita,

Mellyzar, and Herizal 2021:5). Dalam makalah kami kali ini tentu menjadi menarik untuk membahas kebijakan pemerintah pada assesmen kompetensi minimum (AKM) sebagai bentuk perubahan ujian nasional (UN).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap AKM. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan dari UN ke AKM. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik AKM. Studi literatur ini mencakup analisis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003, Permendikbudristek Nomor 17 tahun 2021, dan berbagai dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini melakukan analisis kebijakan dengan menelaah tujuan, pelaksanaan, dan hasil dari penerapan AKM. Analisis ini berfokus pada bagaimana kebijakan AKM diimplementasikan dan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti laporan pemerintah, publikasi akademik, dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan situasi yang ada, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi berdasarkan analisis data yang diperoleh. Pendekatan ini membantu dalam memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai implementasi dan efektivitas AKM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian AKM

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten.

Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia (Asesmen n.d.)

B. Tujuan AKM

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, yaitu kurikulum (apa yang diharapkan akan dicapai), pembelajaran (bagaimana mencapai) dan asesmen (apa yang sudah dicapai). Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen Kompetensi Minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid.

Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian "Teaching at the right level" dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran.

C. Proses Pelaksanaan AKM

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sekolah untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum, diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan AKM

   Pelaksanaan AKM menggunakan biaya yang bersumber dari dana Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bisa dikeluarkan melalui mata anggaran Operasional. Pembiayaan ini meliputi Konsumsi Peserta AKM, Panitia dan Pengawas, Honorarium Pengawas Silang (Antar Sekolah), Pengadaan Alat dan infrastruktur penunjang, Honorarium Proktor dan teknisi, dan Kuota internet.

2. Siswa Sample AKM

   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memilih siswa yang mengikuti Asesmen Nasional secara acak. Diketahui, AKM hanya diikuti oleh 35 siswa per sekolah di pendidikan dasar dan 45 siswa di pendidikan menengah. Pemilihan pada jenjang pendidikan menengah atas dilakukan dengan memperhatikan Nilai pada rapor elektronik atau erapor yang terkoneksi langsung dengan server kementrian pendidikan.(Asesmen n.d.)

3. Alat dan Infrastuktur Penunjang

   Alat dan infrastruktur penunjang AKM mau tidak mau harus dipersiapkan oleh sekolah. Sekolah harus mempersiapkan Ruang Sebgai tempat pelaksanaan dengan kondisi yang kondusif dan nyaman dikarenakan AKM dilaksanakan selama 2-3 jam secara nonstop. Satuan pendidikan juga harus menyediakan infrastruktur fisik AKM. Infrastruktur fisik dapat diperoleh langsung melalui pengadaan aset yang bersumber dari dana BOSP atau melalui penerimaan dana hibah kementrian pendidikan dari menejemen sarana dan prasarana Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia (KEMDIKBUDRISTEK). AKM dapat dilaksanakan secara Online (langsung tanpa sinkronisasi sever lokal) dan Semi-Online (sinkronisasi data melalui sever lokal) dengan spesifikasi sebagai berikut:

D. Komponen Instrumen AKM

Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian Literasi Membaca dan Numerasi yang telah disampaikan terdahulu, soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu tetapi berbagai konten, berbagai konteks dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada Literasi Membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan, dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada Numerasi konten dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu Bilangan, Pengukuran dan Geometri, Data dan Ketidakpastian, serta Aljabar.

Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada Literasi Membaca dan Numerasi dibedakan menjadi tiga level. Pada Literasi Membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Pada Numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik.

	Literasi Membaca	Numerasi
Proses Kognitif	**Menemukan informasi**, mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. **Interpretasi dan integrasi**, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. **Evaluasi dan refleksi**, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks.	**Pemahaman**, memahami fakta, prosedur serta alat matematika. **Penerapan**, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. **Penalaran**, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non rutin.
Konteks	**Personal**, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. **Sosial Budaya**, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. **Saintifik**, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun *futuristic*.	**Personal**, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. **Sosial Budaya**, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. **Saintifik**, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun *futuristic*.

	Literasi Membaca	Numerasi
Konten	**Teks informasi**, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. **Teks fiksi**, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca.	**Bilangan**, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan (cacah, bulat, pecahan, desimal). **Pengukuran dan geometri**, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. **Data dan ketidakpastian**, meliputi pemahaman, interpretasi serta penyajian data maupun peluang. **Aljabar**, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi (termasuk pola bilangan), serta rasio dan proporsi.

E. Pelaporan Hasil AKM

Asesmen Nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen Nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen Nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil Asesmen Nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti di-jelaskan sebelumnya, hasil Asesmen Nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, Asesmen Nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan.

Hasil AKM diakumulasikan Secara menyeluruh dan di proses sesuai sampel yang telah ditentukan, lalu dituangkan kedalam rapor pendidikan pada bagian menu literasi dan numerasi yang kemudian dapat dianalisis pada bagian mana saja Satuan pendidikan perlu peningkatan. Hasil pada rapor pendidikan berguna untuk meningkatkan performa satuan pendidikan dan perbaikan dapat dilakukan untuk masa yang akan datang dengan mengunakan analisis berbasis data sesuai yang disediakan oleh rapor pendidikan. Selain itu, hasil AKM dapat dipergunakan untuk Memantau dan mendorong kemajuan belajar individu siswa, Alokasi fasilitas, sumber daya manusia, dan pelatihan sesuai kebutuhan sekolah atau daerah.

Hasil AKM dilaporkan dalam empat kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda.(Rokhim et al. 2021) Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah: 1) Perlu Intervensi Khusus, 2) Dasar, 3) Cakap, 4) Mahir. Penjelasan tiap tingkat kompetensi pada Literasi Membaca dan Numerasi ditunjukkan di Tabel berikut.

Tingkat Kompetensi Literasi Membaca
Perlu Intervensi Khusus Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana.
Dasar Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.
Cakap Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks; mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.
Mahir Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks; mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks.

Tingkat Kompetensi Numerasi
Perlu Intervensi Khusus Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas.
Dasar Murid memiliki keterampilan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.
Cakap Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam.
Mahir Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.

Rapor Pendidikan dapat di akses oleh seluruh Warga Sekolah seperti Kepala Satuan, Guru dan Operator Sekolah dengan akun belajar.id sesuai jenjang dan atau Plt Kepala Satuan Pendidikan, yaitu guru yang diberi tugas sebagai pelaksana untuk menjamin kelancaran dalam mengelola, memberikan pelayanan di satuan pendidikan dan bersifat sementara.(Standar 2023) berikut dapat dilihat contoh halaman rapor pendidikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Asesmen nasional dilakukan bertujuan untuk mengubah paradigma evaluasi pendidikan di Indonesia sebagai upaya mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil bukan mengevaluasi capaian peserta didik yang sebelumnya digunakan dalam Ujian Nasional. Asesmen nasional akan dilakukan pada jenjang pertengahan sekolah yaitu kelas 5 untuk tingkat SD/MI, kelas 8 untuk tingkat SMP/MTs, dan kelas 11 untuk tingkat SMA/MA/SMK sehingga mendorong guru dan kepala sekolah memperbaiki mutu pembelajaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan pelaku pendidikan untuk memperbaiki pembelajaran di tahun berikutnya, Oleh karenanya guru dan siswa harus dipastikan kesiapannya karena Asesmen nasional ini menggunakan instrumen penilaiannya adalah PISA (*Programme for international student*) dan TIMSS (*Trend in international Mathematics and Science Study*).

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kebijakan Pemerintah pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN).

DAFTAR RUJUKAN

Asesmen, Pusat. n.d. "Pembelajaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pembukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.(2021)." *Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA. Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan, Dan Teknologi*.

Driessen, Geert. 2021. "Islamic Primary Schools in the Netherlands: The Founding, the Debate, and the Outcomes." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4(1):18–31.

Hasanah, Mizanul, and Tri Fahad Lukman Hakim. 2021. "Analisis Kebijakan Pemerintah Pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan* 1(3):252–60.

Novita, Nanda, Mellyzar Mellyzar, and Herizal Herizal. 2021. "Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan Dan Persepsi Calon Guru." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5(1).

Rokhim, Deni Ainur, Binti Nuriyati Rahayu, Laila Nur Alfiah, Ristiwi Peni, Bambang Wahyudi, Asnan Wahyudi, and Hayuni Retno Widarti. 2021. "Analisis Kesiapan Peserta Didik Dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter, Dan Survey Lingkungan Belajar)." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 4(1):61.

Standar, Badan. 2023. "Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.(2022)." *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*.

Winata, Anggun, Ifa Seftia Rakhma Widiyanti, and Sri Cacik. 2021. "Analisis Kemampuan Numerasi Dalam Pengembangan Soal Asesmen Kemampuan Minimal Pada Siswa Kelas XI SMA Untuk Menyelesaikan Permasalahan Science." *Jurnal Educatio Fkip Unma* 7(2):498–508.

Wirdayanti, Mona Evi. 2024. "Analisis Kemampuan Literasi Sains Pada Asesmen Kompetensi Minimum Di SMPN 14 Banda Aceh."